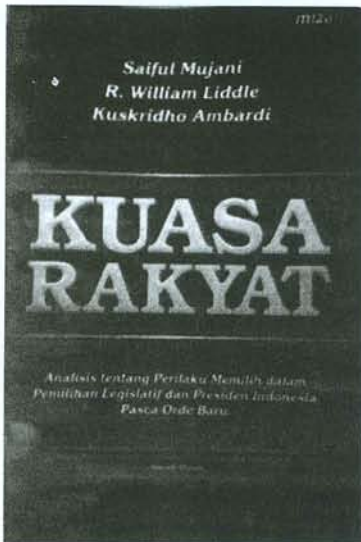


RESENSI BUKU



| | | |
|-----------|---|---|
| Judul | : | Kuasa Rakyat : Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru |
| Pengarang | : | Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskridho Ambardi |
| Penerbit | : | Mizan Cetakan 1, Juni 2012 |
| Kolasi | : | xvi + 556 |
| ISBN | : | |

TIGA MODEL MENDEDAH KUASA RAKYAT

"Rakyat berkuasa menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak berkuasa dalam politik Indonesia. Rakyat mengangkat dan menurunkan penguasa lewat pemilihan umum dengan syarat pemilu atau pilpresnya berlangsung secara jujur. Hanya sampai pada titik inilah batas yang kami sebut sebagai "kuasa rakyat". Ia jelas ada, tetapi kekuatannya terbatas,"(hal.451).

Judul buku ini bisa dibilang cukup provokatif. Kata rakyat, selalu identik dengan atribusi negatif dan lemah. Rakyat adalah mereka yang miskin, mereka yang tidak berpendidikan, dan mereka yang tak pernah menang dalam pertarungan kekuasaan. Namun buku ini membuat frasa gabungan dari rakyat dan kuasa, *Kuasa Rakyat*. Seolah ingin menekankan bahwa rakyat pun bisa berkuasa, mereka tak melulu tertindas. Di awal, saya berharap ada sebuah diskusi mendalam tentang frasa ini. Pertanyaan naif yang muncul dari benak adalah memangnya rakyat bisa berkuasa? Apa maksud dari kuasa rakyat?

Sub judul dan pendahuluan buku ini buru-buru menegaskan pertanyaan itu karena pertanyaan itu salah arah. Buku ini bukan soal agitasi dan moral demokrasi. Buku ini didasarkan pada riset saintifik-empirik perihal perilaku memilih. Dus, kuasa rakyat di dalam buku ini dibatasi dalam sebuah batasan : kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat untuk memilih siapa yang akan berkuasa atas mereka. Kuasa ini sepenuhnya milik mereka. Bentuk kuasa yang dimaksud dalam buku ini adalah tentang partisipasi rakyat dalam pemilihan umum di Indonesia.

Dengan definisi tersebut, data keikutsertaan pemilih dalam pemilu (*voter turnout*) mungkin akan berguna sebagai awalan. *Voter turnout* dalam pemilu di Indonesia

menurun dari tahun ke tahun. Pada pemilu 1999, jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif sebanyak 93 persen. Angka ini lebih baik daripada pemilu pertama pada 1955 yakni 87 persen. Namun, angka partisipasi ini menurun dalam pemilu-pemilu berikutnya. Secara berturut-turut, pada 2004 dan 2009, rakyat yang ikut menjadi 85 persen dan 71 persen.

Pembaca yang berlatar belakang humaniora dan filsafat, sebaiknya menyiapkan diri sebelum membuka lembar-lembar buku setebal 556 halaman ini. Definisi soal kuasa, rakyat, politik, perilaku politik yang dipakai semuanya berasal dari tradisi positivistik. Dus, membaca buku ini berarti menunda sejenak wacana soal negara gagal, demokrasi setengah hati, dan sebagainya.

Dalam studi perilaku memilih, ada dua konsep kunci yakni partisipasi politik dan pilihan politik. Konsep pertama mengacu pada tindakan warga negara biasa yang dilakukan dengan sukarela untuk memengaruhi keputusan-keputusan publik (*public policy*). Konsep ini secara operasional, salah satunya diturunkan dalam keikutsertaan dalam pemilu dan pemilihan presiden (*voter turnout*). Sementara yang kedua adalah penjelasan tentang mengapa seseorang memilih salah satu partai/kandidat dan bukan yang lain.

Ada tiga model untuk menjelaskan perilaku memilih tersebut, yaitu model sosiologis, psikologis dan model pilihan rasional. Model sosiologis berkeyakinan, kelompok sosial, tingkat pendidikan, agama dan etnis lah faktor yang paling menentukan perilaku pemilih. Sedang model psikologis, menitikberatkan kedekatan kepada partai (*party ID*). Sementara model terakhir, mempercayai bahwa pemilih adalah makhluk yang rasional. Ia mempertimbangan untung rugi, khususnya ekonomi dan politik, dalam laku memilih.

Model sosiologis adalah model yang paling mula dalam studi perilaku pemilih. Agama, suku, ras dan kelas sosial dijadikan faktor utama yang menentukan perilaku pemilih. Orang dengan kondisi ekonomi yang mapan, berdasarkan model ini, akan cenderung memanfaatkan hak pilih mereka daripada mereka yang miskin. Orang yang berpendidikan juga lebih berkemungkinan untuk berpartisipasi dalam pemilu, daripada mereka yang tidak berpendidikan.

Faktor sosiologis yang lain adalah agama. Orang yang beragama Islam cenderung untuk memilih partai Islam. Pada pemilu pertama di Indonesia, tahun 1955, model ini bisa digunakan untuk menjelaskan perolehan suara partai Islam yang terhitung besar, yakni 40 persen. Namun model ini tidak cukup baik untuk menjelaskan apa yang terjadi saat ini.

Dengan pertimbangan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, seharusnya menurut model sosiologis ini, partai Islam lah yang akan menang. Namun, partai Islam malah kalah dalam perolehan suara dengan partai-partai sekuler. Hal ini berarti, model sosiologis kurang bisa menjelaskan perilaku pemilih dalam konteks pemilu Indonesia saat ini.

Model psikologis memberikan penjelasan yang berbeda. Warga berpartisipasi dalam pemilu karena perasaan dekat dengan partai tertentu, memiliki informasi politik, ketertarikan dengan politik, dan percaya bahwa pilihan mereka mampu turut memperbaiki keadaan (*political efficacy*). *Political efficacy* ini lah yang mungkin bisa menjadi

salah satu penjelasan peningkatan tingkat golput. Jika masyarakat optimis akan kemampuan mereka untuk mengubah keadaan, tentu semuanya akan berpartisipasi dalam pemilu.

Sementara itu, model yang terakhir memandang masyarakat sebagai makhluk rasional. Mereka memilih atas dasar pertimbangan untung rugi. Model ini dapat menjelaskan mengapa tingkat golput di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika baik memilih ataupun tidak, jalannya pemerintahan akan sama saja mengapa seseorang harus susah-susah memilih? Dengan tidak memilih, seseorang meminimalkan ongkos personal yang mereka keluarkan.

Jika asumsi dari model ini benar, tentu tidak akan ada orang yang ikut dalam pemilihan umum. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Meskipun tingkat golput terus meningkat, tetapi jumlah mereka yang memilih tetap lebih banyak. Para ilmuwan yang memegang model ini, melakukan sedikit modifikasi. Rasionalitas pemilih didefinisikan dengan evaluasi atas kinerja partai/pemerintah saat berkuasa dan harapan atas mereka jika mereka memegang kekuasaan kembali. Model modifikasi ini menjelaskan digunakan untuk menjelaskan, sebagai contoh, kemenangan SBY atas Megawati pada pemilu tahun 2004.

Ketiga model inilah, dengan sofistikasi teoritik masing-masing, yang dielaborasi dalam riset yang mendasari lahirnya buku ini. Setiap model memiliki kelebihan, sekaligus kekurangan. Gabungan ketiga model ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan saling bisa menambal kekurangan masing-masing model. Bab-bab dalam buku ini didedikasikan untuk elaborasi tiga model tersebut.

Bagian yang paling menarik dalam buku ini, selain sajian data yang detail, adalah penjelasan tentang fenomena demokrat kritis di Indonesia. Para demokrat kritis ini adalah warga yang menggunakan kerangka rasional dalam perilaku politik mereka. Mereka adalah warga yang mengenyam pendidikan, dan sebagian besar mereka yang hidup di wilayah perkotaan. Mereka memilih berdasarkan penilaian positif atau negatif terhadap kinerja pemerintah. Mereka terpanggil oleh kewajiban sebagai warga negara (*civic duty*) dalam memilih. Kaum demokrat kritis inilah yang secara kuantitas semakin berkembang di Indonesia.

Menurut saya, buku ini rampung dalam misinya untuk memberikan penjelasan saintifik atas perilaku pemilih Indonesia pasca-Orde Baru. Data yang disampaikan begitu kaya, dengan durasi riset panjang. Sangat susah untuk mencari celah riset ini, jikalau pembaca sama-sama berasal dari paradigma penelitian positivistik. Karya kolaborasi tiga alumnus Ohio State University merupakan sumbangan yang cukup signifikan untuk kajian demokrasi di Indonesia. Ia mengisi celah diskusi publik soal perilaku pemilih dan demokrasi. Karya ini juga dapat menjadi pengingat untuk para komentator politik agar berhati-hati sebelum berpendapat soal pemilih Indonesia tanpa data yang memadai.

Memang, seperti yang dibuktikan dalam penelitian buku ini demokrasi tetap menjadi pilihan dari mayoritas rakyat Indonesia meskipun ia bukan sistem pemerintahan terbaik. Namun, setidaknya sistem inilah yang memberikan kekuasaan untuk rakyat walaupun dalam derajat minimal. Paling tidak, rakyat berkuasa untuk memilih siapa yang berkuasa atas mereka. Setidaknya, rakyat dapat menjadi penguasa meskipun hanya sejenak. (Muhammad Nafi', Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM 2009)